



SUAR Spotlight

Suahasil dan Sinyal Disiplin Fiskal

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Ringkasan Eksekutif: Suahasil dan Sinyal Disiplin Fiskal	3
Membaca Arah Fiskal dan APBN di Tangan Suahasil Nazara	5

Artikel ini bisa di akses di <https://www.suar.id/>



Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) berjabat tangan dengan Pejabat lama Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) se usai serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/agr

Ringkasan Eksekutif: Suahasil dan Sinyal Disiplin Fiskal

Menarik untuk melihat bagaimana arah kebijakan Suahasil ke depannya.

Penulis: **Tim SUAR**

Kementerian Keuangan baru saja memiliki nahkoda baru. Suahasil Nazara resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Menarik untuk melihat bagaimana arah kebijakan Suahasil ke depannya.

Suahasil sejatinya bukan wajah baru di lingkungan "Lapangan Banteng". Dia sudah menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 saat mendampingi Sri Mulyani yang kala itu menjadi Menteri Keuangan.

Duetnya bersama Mulyani lekat dengan rezim disiplin fiskal yang baik. Pengalaman panjang itulah yang

melekatkan citra teknokrat disiplin fiskal pada diri Suahasil.

Tak hanya itu, Suahasil sendiri juga merupakan satu almamater dengan Sri Mulyani. Keduanya merupakan sarjana ekonomi jebolan FEB UI. Mulyani lulus tahun 1986, sedangkan Suahasil lulus 1994.

Tak hanya itu, mereka pun berbagi kesamaan almamater di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat (AS). Mulyani menyelesaikan S2 pada 1990 dan S3 pada 1992 di kampus tersebut. Sementara Suahasil menyelesaikan program doktoralnya di kampus itu pada 2003.

Profil Suahasil Nazara



Suahasil meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1994. Ia kemudian melanjutkan studi ke Cornell University, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar Master of Science (M.Sc.) pada tahun 1997. Selanjutnya, ia menyelesaikan program doktoral di University of Illinois at Urbana-Champaign dan meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) di bidang ekonomi pada tahun 2003, yang semakin memperkuat kapasitasnya dalam bidang akademik dan kebijakan ekonomi. Karier Suahasil di Kementerian Keuangan kian signifikan ketika ditugaskan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif pada 31 Oktober 2016. Pada 25 Oktober 2019, ia dipercaya sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kini menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026.

Sumber: Kementerian Keuangan • Foto: Kementerian Keuangan
Diolah oleh Tim SUAR / Krisna

SUAR SOLUTION JOURNALISM
FOR EXECUTIVES

Made with Flourish • Create interactive content



Suahasil Nazara menyampaikan sambutan usai dilantik menjadi Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (14/9/2026). Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.

Membaca Arah Fiskal dan APBN di Tangan Suahasil Nazara

Simak ulasan prediksi arah kebijakan fiskal dan APBN dari Menteri Keuangan Baru Suahasil Nazara.

Penulis: **Benediktus Krisna Yogatama, Chris Wibisana, Ridho Sukra dan Uswatun Hasanah**

Setiap ada pejabat tinggi negara yang baru dilantik, salah satu pertanyaan umum di benak para pengusaha adalah "Bagaimana arah kebijakan pejabat ini ke depannya?". Pertanyaan itu pun kembali mengemuka usai estafet kepemimpinan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suhasil Nazara.

Senin (14/9/2026), "Lapangan Banteng" seakan bergetar terkejut. Pucuk pimpinan korps bendahara negara ini mendadak berubah. Setelah memimpin 1 tahun lewat 6 hari, posisi Purbaya sebagai Menteri Keuangan digantikan oleh wakilnya yakni Suhasil.

Menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN

Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Suhasil memberikan keterangan pertamanya sebagai menteri keuangan kepada wartawan.

"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya, menjaga kesehatan menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," ujar Suhasil.



Klik Gambar untuk Menonton

Menjaga kredibilitas dan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penting, lantaran hal ini menjadi salah satu sorotan dari mata dunia. Lembaga pemeringkat internasional, Moody's misalnya pada Februari 2026 lalu mengubah outlook Indonesia dari stabil

menjadi negatif. Namun, rating Indonesia bertahan pada posisi Baa2.

Dalam keterangannya, Moody's memahami pemerintah Indonesia sedang berupaya melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini memang penting sebagai prasyarat menjadi negara maju.

Di sisi lain, Moody's memberikan catatan penting bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui percepatan belanja negara juga mengandung risiko kesehatan fiskal. Ini salah satunya disebabkan karena basis pendapatan negara Indonesia masih belum terlalu kuat.

Selain itu, Moody's menyoroti kian

berkurangnya unsur predictability dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Jika terus berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan.

Peringkat Utang Indonesia

Lembaga Pemeringkat	Peringkat Utang	Outlook	Tanggal Pembaruan Terakhir
Fitch	BBB	Negatif	4 Maret 2026
Moody's	Baa2	Negatif	5 Februari 2026
S&P	BBB	Stabil	13 Juli 2026
Japan Credit Rating Agency (JCR)	BBB+	Stabil	22 September 2025
Rating & Investment (R&I)	BBB+	Stabil	24 Oktober 2025

Sumber: Kementerian Keuangan
Grafis : Tim SUAR/Krisna

SUAR

Made with Flourish • Create a table

Sekarang, mari kita kembali ke keterangan Suhasil. Ia menjelaskan, akan melanjutkan pengelolaan keuangan negara yang selama ini dijalankan Kementerian Keuangan, dengan menjadikan APBN sebagai motor pertumbuhan sekaligus stabilisator ekonomi domestik.

Suhasil juga menegaskan

Soal belanja negara

Secara khusus, Suhasil menggarisbawahi praktik efisiensi APBN akan tetap dilaksanakan secara

komitmennya menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir Juni 2026, realisasi defisit APBN mencapai Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB.

terukur, sehingga dengan belanja yang ada, keuangan negara dapat menghasilkan output yang maksimal.

"Menurut saya, ini bukan perubahan. Ini kelanjutan saja, dan selama ini saya ada di dalam Kemenkeu. Kita akan terus melanjutkan keuangan negara dengan cara yang lebih baik," pungkas Suhasil.

Lebih lanjut, ujar Suahasil, efisiensi bukan semata-mata berarti mengurangi belanja negara. Lebih dari itu, efisiensi diarahkan untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan menghasilkan keluaran (output) yang optimal dan sesuai

dengan perencanaan.

“Tentu kita selalu mencari belanja yang lebih efisien, tetapi menghasilkan output yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan,” ucapnya.

Soal pendapatan negara dan pajak

Sementara itu, mengenai pendapatan negara dan pengumpulan pajak, sampai dengan artikel ini ditulis, sejak resmi menjadi Menteri Keuangan, Suahasil belum memberikan keterangan soal ini.

Namun, sebelumnya ketika masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, Suahasil pernah berbicara

cukup panjang soal pajak dan pendapatan negara. Saat memberikan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada Rabu (15/4/2026), Suahasil menyampaikan materi mengenai pendapatan negara dengan menekankan pentingnya memahami perpajakan tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari perspektif ekonomi yang lebih luas.



Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) berjabat tangan dengan Pejabat lama Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) usai serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/agr

Ia memaparkan, aspek pendapatan negara khususnya perpajakan harus dilihat secara komprehensif, mulai dari konsep dasar hingga keterkaitannya dengan perekonomian global.

“Pendapatan negara itu apa, perpajakan di Indonesia itu seperti apa, lalu kemudian ada yang namanya belanja perpajakan, pajak dan perekonomian, bagaimana hubungan pajak dengan perekonomian, dan perdebatan tentang pajak global, sesuatu yang fascinating sebenarnya,” ucapnya.

Dalam kelas tersebut, Wamenkeu Suahasil mengajak para mahasiswa memahami rasionalitas ekonomi di

balik kebijakan pajak. Ia menambahkan, perpajakan memiliki fungsi penting dalam kebijakan fiskal suatu negara.

“Perpajakan adalah kebijakan fiskal, dia adalah alat untuk alokasi, stabilisasi dan distribusi,” jelasnya.

Melalui pemaparan ini, diharapkan para generasi muda bangsa dapat memahami bahwa perpajakan bukan sekadar instrumen penerimaan negara, melainkan juga alat bagi suatu negara dalam mendorong pertumbuhan, menjaga stabilitas dan juga pemerataan ekonomi suatu negara.

Disiplin fiskal

Ekonom Senior dan Pengajar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Ryan Kiryanto menilai pemilihan Suahasil sejatinya menandai kembalinya kepemimpinan otoritas

fiskal pada sosok yang mampu mengartikulasikan kebijakan makroekonomi secara terstruktur, sistematis, dan straight-forward tetapi tetap terukur.

“Menurut saya, Pak Suahasil adalah antitesis Pak Purbaya, dengan latar belakangnya sebagai akademisi yang tenang, logis, dan bukan tipe yang ‘mudah bicara’. Ini selaras dengan pakem bahwa menteri keuangan tidak perlu banyak menyampaikan pernyataan, tetapi setiap pernyataannya justru ditunggu seperti gubernur bank sentral,” kata Ryan.

Kapasitas Suahasil dalam memimpin, Ryan menambahkan, juga terbentuk dari pengalaman mendampingi Sri Mulyani Indrawati sebagai wakil menteri keuangan sejak 2019. Meski demikian, Ryan menilai Suahasil tetap perlu melaksanakan reorganisasi internal Kementerian Keuangan dan mengembalikan posisi-posisi kunci yang telah dirombak Purbaya selama

satu tahun menjabat.

Tak hanya itu, tanggung jawab yang menanti Suahasil dalam waktu dekat adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap kebijaksanaan fiskal pemerintah. Pemulihan ini jelas membutuhkan waktu, tetapi ia menilai terlambat masih lebih baik daripada tidak sama sekali.

“Saya pikir reshuffle ini akan mendorong pembalikan ke era disiplin fiskal. Namun, di sisi lain, Suahasil juga tidak membicarakan kebijakan menteri sebelumnya. Sikap menghindari polemik ini betul-betul bijaksana, sehingga pasar dapat mengharapakan otoritas fiskal kembali pada marwah disiplin fiskal yang benar, prudent, dan kredibel,” imbuhnya.

Ke depan, tidak hanya posisi di Kementerian Keuangan, melainkan posisi Suahasil sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ex-officio pun diproyeksikan akan meningkatkan kepercayaan diri organ KSSK lain yang selama ini mengkhawatirkan pernyataan-pernyataan eksplisit Purbaya.

Tak keliru pandangan bahwa naiknya Suahasil menjadi Menteri Keuangan memberi sinyal bahwa keuangan negara akan kembali pada pakem disiplin fiskal.

Rekam jejak Suahasil erat kaitannya dengan aplikasi disiplin fiskal. Sejak menjadi Wakil Menteri Keuangan pada 2019, Suahasil menjadi pembantu Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani

yang mengedepankan disiplin fiskal baik. Pengalaman panjang itulah yang melekatkan citra teknokrat disiplin fiskal pada diri Suahasil.

Tak hanya itu, Suahasil sendiri juga merupakan satu almamater dengan Sri Mulyani. Keduanya merupakan sarjana ekonomi jebolan FEB UI. Mulyani lulus tahun 1986, sedangkan Suahasil lulus 1994.

Tak hanya itu, mereka pun berbagi kesamaan almamater di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat (AS). Mulyani menyelesaikan S2 pada 1990 dan S3 pada 1992 di kampus tersebut. Sementara Suahasil menyelesaikan program doktoralnya di kampus itu pada 2003.

Profil Suahasil Nazara



Suahasil meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1994. Ia kemudian melanjutkan studi ke Cornell University, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar Master of Science (M.Sc.) pada tahun 1997. Selanjutnya, ia menyelesaikan program doktoral di University of Illinois at Urbana-Champaign dan meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) di bidang ekonomi pada tahun 2003, yang semakin memperkuat kapasitasnya dalam bidang akademik dan kebijakan ekonomi. Karier Suahasil di Kementerian Keuangan kian signifikan ketika ditugaskan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif pada 31 Oktober 2016. Pada 25 Oktober 2019, ia dipercaya sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kini menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026.

Sumber: Kementerian Keuangan • Foto: Kementerian Keuangan **SUAR**
Diolah oleh Tim SUAR / Krisna

Made with Flourish • Create interactive content

Mengantisipasi RAPBN 2027

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, meskipun disebut ekspansif dalam pidato, kepemimpinan Suhasil kini dihadapkan pada postur RAPBN 2027 yang justru menunjukkan pengetatan.

Mengacu pada dokumen rancangan APBN tahun depan, Faisal menggarisbawahi belanja negara yang hanya tumbuh 3,9%, defisit APBN menyusut menjadi Rp671,2 triliun, dan keseimbangan primer juga direncanakan lebih rendah.

Poin-Poin Penting RAPBN 2027

Perihal	Nilai	Pertumbuhan dibanding outlook 2026
Pendapatan Negara	Rp3.426,0	6,8%
Belanja Negara	Rp4.097,2	3,9%
Defisit	2,40% dari PDB	

Sumber: Pidato Presiden dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR-RI ke-1 Masa Persidangan 2026-2027, Kementerian Keuangan
Grafis : Tim SUAR/Krisna

SUAR SOLUTION JOURNALISM
@SINELITIDEN

Made with Flourish • Create a table

Menurutnya, beban terbesar fiskal justru di luar postur anggaran, yaitu operasi kuasifiskal berupa subsidi energi dan penugasan Danantara serta SMV Kemenkeu. Pengalihan utang proyek Whoosh sekitar Rp116 triliun ke Kementerian Keuangan menunjukkan kewajiban kontinjensi semacam ini tidak lenyap, hanya berpindah tempat dan waktu.

Faisal mengingatkan, defisit yang mengecil dalam RAPBN 2027 tidak membuat kebutuhan utang berkurang. Sebaliknya, pembiayaan utang justru

meningkat menjadi Rp876,3 triliun, atau sekitar Rp205 triliun lebih besar daripada kebutuhan defisit, karena selisihnya dipakai untuk menambah investasi pemerintah di luar hitungan defisit.

Tak hanya itu, Faisal menyarankan agar dalam waktu dekat, Suhasil meninjau kembali asumsi-asumsi makro dalam RAPBN 2027 secara lebih cermat. Ia mengingatkan, ketika pertumbuhan meleset, penerimaan pajak akan tertekan, sementara ketika harga minyak di luar perkiraan, subsidi dan kompensasi energi melonjak.

“Dengan ruang penyesuaian yang sudah menyempit, kesalahan asumsi makro pada 2027 akan lebih cepat berujung pada pemotongan belanja dibanding tahun-tahun sebelumnya, tandas Faisal.

Aspirasi pengusaha

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menekankan bahwa aspek terpenting bagi dunia usaha dalam transisi kepemimpinan adalah komitmen Menkeu menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal, kepastian arah kebijakan, dan kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap perekonomian Indonesia.

“Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang,

kontinuitas tersebut kami harapkan dapat membantu menjaga agar transisi kepemimpinan tidak menimbulkan perubahan arah kebijakan yang terlalu mendadak,” ujar Shinta.

CEO Sintesa Group itu menggarisbawahi predictability menjadi sangat penting, terutama terkait kebijakan perpajakan, kepastian, insentif investasi, belanja pemerintah, serta kebijakan fiskal yang berdampak terhadap biaya dan keputusan bisnis.

“Kami berharap setiap perubahan kebijakan dilakukan secara terukur, dengan komunikasi yang baik dan ruang dialog yang memadai dengan dunia usaha, sehingga perusahaan memiliki kepastian dalam melakukan perencanaan investasi dan ekspansi,” tuturnya.

Shinta mengakui tantangan Menteri Keuangan ke depan tidak ringan. Karena itu, kualitas belanja, efektivitas penerimaan negara, disiplin fiskal, serta kemampuan menjaga kepercayaan pasar menjadi sama pentingnya.

“Dunia usaha juga berharap kebijakan penerimaan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam jangka pendek, tetapi tetap mempertimbangkan daya saing dan kemampuan sektor produktif untuk tumbuh,” kata Shinta.

Untuk itu, Shinta menitipkan lima pesan dan masukan yang diharapkan dari kepemimpinan baru Kementerian Keuangan,

1. Melanjutkan langkah-langkah debottlenecking yang selama ini telah dijalankan Satgas P3M-PPE;
2. Memastikan kredibilitas APBN sejalan dengan program-program propertumbuhan yang menciptakan lapangan pekerjaan formal;
3. Mengawal kebijakan fiskal agar tidak menambah cost of doing business, dengan memaksimalkan upaya-upaya ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, sehingga tidak mengganggu kelancaran usaha;
4. Melanjutkan pemberian insentif untuk sektor usaha padat karya dan UMKM, dengan desain pemberian insentif yang lebih targeted dan terukur;
5. Menjaga komunikasi intensif dengan pelaku usaha dan sektor swasta dalam kerangka public-private consultation

Tak hanya itu, Shinta juga berharap Suahasil dapat menyelesaikan mekanisme restitusi pajak yang sangat memengaruhi kelancaran arus kas perusahaan. Komunikasi yang sudah baik dan terjalin erat dengan Apindo itu, kata Shinta, perlu menjadi modal penting dalam menavigasi tantangan makroekonomi ke depan.

“Kami mengharapkan kerja sama ini bisa terus berlanjut, sehingga masukan-masukan dari lapangan, penindakan-penindakan barang ilegal, serta perbaikan kebijakan perpajakan dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan Pak Sua,” pungkash Shinta.

Wakil Ketua Umum Kamar dan dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, di tengah beragam gejolak dan ketidakpastian, penunjukan Suahasil

adalah keputusan yang sangat tepat.

"Mengingat jam terbangnya yang sudah lama malang melintang di Kementerian Keuangan sehingga akan sangat cepat dan mudah dalam mengambil berbagai kebijakan fiskal dan ekonomi makro yang memang sedang ditunggu tunggu dunia usaha," ujar Saleh.

Ia menambahkan, latar belakang Suahasil yang juga seorang akademisi dari FEB UI yang juga pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal jadi bekal untuk jadi bendahara negara.

Menurut Saleh, Suahasil mengetahui bagaimana cara menggerakkan sektor industri dan perdagangan agar mesinnya terus bergerak sehingga ekonomi dapat tumbuh 8% seperti yang diharapkan Presiden Prabowo.

Dukungan parlemen

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan kerja sama erat Komisi XI dan Kementerian Keuangan akan tetap terjaga mengingat Suahasil bukanlah sosok yang baru di Kementerian Keuangan.

“Beliau tahu apa yang harus dikerjakan,

dan saat ini kita tinggal melihat bagaimana beliau menyeimbangkan semua situasi yang ada, serta bagaimana beliau menjaga sektor keuangan sebagai Ketua KSSK yang sekarang sudah mulai menemukan jalan menuju stabilisasi perekonomian,” kata Misbakhun.

Tren Realisasi APBN

Perihal	APBN 2026	Realisasi APBN 2026 per 30 Juni 2026	Realisasi
Pendapatan Negara	Rp3.153 triliun	Rp1.469 triliun	46,27%
Belanja Negara	Rp3.842 triliun	Rp1.656 triliun	43,10%
Surplus/Defisit	(Rp689,1 triliun)	(Rp196,5 triliun)	
Surplus/Defisit Terhadap PDB %	-2,68%	(0,76%)	

Sumber: Kementerian Keuangan
Grafis: Krisna/Suar.id

SUAR SUKSES TRANSFORMASI
KEMAJUAN BERKUALITAS

Made with Flourish • Create a table

Dukungan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro yang menyambut positif pengangkatan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, Senin (14/9/2026). Menurutnya, pengalaman panjang Suahasil di Kementerian Keuangan menjadi modal penting

untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal nasional.

Fauzi menilai Suahasil merupakan sosok yang memiliki kapasitas dan pengalaman mumpuni dalam mengelola kebijakan fiskal. Selama ini, Suahasil telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan terlibat langsung dalam berbagai proses penyusunan kebijakan keuangan negara.

Baca juga:

Setahun Purbaya, Pertumbuhan Berbalik, tapi Dunia Bukan Surga



 **SUAR Inspirasi Penggerak Dunia Usaha**

Suahasil Nazara, Disiplin Fiskal, dan Tugas Besar Pulihkan Kepercayaan



 **SUAR Inspirasi Penggerak Dunia Usaha**

Menteri Keuangan dan the Beautiful Game



 **SUAR Inspirasi Penggerak Dunia Usaha**

SUAR

Jurnalisme Solusi Penggerak Dunia Usaha



Kontak : CS SUAR

☎ 088219993888

📧 @suarinspirasi

✉ office@suar.id

📘 Suar Inspirasi Produktif

🌐 Suar Inspirasi Produktif

🌐 www.suar.id